

DAFTAR PUSTAKA

a) Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Andrian Sutedi. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Arba dan Diman Ade Mulada. *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Didik Ariyanto. *Pelaksanaan Fungsi dan Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Kabupaten Grobogan, Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.
- Edmon Makarim. *Hukum Telematika dan Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Erwin Kallo. *Sistem Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Hak Tanggungan Elektronik*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- J. Satrio. *Hukum Jaminan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Jayadi Setiabudi. *Pedoman Pengurusan Surat Tanah & Rumah beserta Perizinannya*. Yogyakarta: Penerbit Buku Pintar, 2015.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Hak Tanggungan*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Koeswahyono. *Dasar-dasar Hukum Pertanahan*. Malang: UMM Press, 2013.
- Maria S.W. Sumardjono. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Maria S.W. Sumardjono. *Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2005.

- Maria S.W. Sumardjono. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Patrik dan Kashadi. *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan*.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2005.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sara Exaudia. *Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Batam*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2020.
- Siti Malikhatun Badriyah. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya: Analisis Hukum Praktis*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2015.
- Siti Malikhatun Badriyah. *Sistem Jaminan Kebendaan dalam Perkembangan Hukum Nasional*. Semarang: UNS Press, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Implikasi Hak Tanggungan terhadap Pemberian Kredit oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: BP Cipta Jaya, 2006.
- Suteki dan Taufani Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hak Tanggungan: Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi*. Bandung: Alumni, 1999.
- Tisnawati Suleiman. *Prinsip-Prinsip Hukum Agraria dalam Kerangka Hak Tanggungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.

- Urip Santoso. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati. *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

b) Makalah, Artikel dan/atau Jurnal

- Ahmad, G. A. "Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Sengketa Agraria dan Viktimologi: Studi Kasus Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 1 (2018): 12–24.
- Ahmad Mujahidin. "Sistem Pendaftaran Tanah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia." Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2019.
- Alimuddin, N. H. "Implementasi Sertifikat Elektronik sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia." *SASI* 27, no. 3 (2021): 335–345.
- Firman Nur Rokhmad, et al. "Tinjauan Yuridis Hak Tanggungan dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia: Regulasi dan Praktik di Lapangan." *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2025).
- Ilham Fathul Maarif, Dodi Brian Sirait, Aprila Niravita, dan Muhammad Adymas Hikhal Fikri. "Pengembangan Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah sebagai Solusi untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 6 (2024): 173–178.
- Jurnal Agraria dan Pertanahan*. "Implementasi Hak Tanggungan Elektronik dalam Sistem Pertanahan di Indonesia." Vol. 15, No. 1, 2020.
- Nia Kurniati dan Efa Laela Fakhriah. "BPN sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016." *Sosiohumaniora* 19, no. 2 (2017): 95–105.

Rachmadi Usman. "Digitalisasi Layanan Pertanahan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum*(2021): 45.

Suryo Adhi Pratomo, Erny Kencanawati, dan Refki Ridwan. "Akibat Hukum Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik terhadap Kepastian Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan yang Dibuat di Hadapan PPAT."

Urip Santoso. "Pendaftaran Tanah dan Permasalahannya." *Jurnal Perspektif* 17, no. 3 (2012): 185.

c) Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.